

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam, meliputi wilayah perairan yang luas, kawasan pegunungan, pesisir pantai, serta daratan yang subur. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya demi kesejahteraan nasional yang berkelanjutan. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan melalui pengembangannya sebagai destinasi wisata (Setiawan, 2015: 978). Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia secara melimpah dapat dioptimalkan melalui pengembangan sektor pariwisata. Indonesia menawarkan beragam jenis pariwisata, mulai dari wisata berbasis alam hingga wisata yang berfokus pada kekayaan budaya sehingga sektor ini dapat dijadikan sebagai sumber devisa utama negara (Prayogo, 2020: 117).

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata mencakup beragam aktivitas perjalanan wisata yang ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata khususnya melalui kewenangan dalam pengaturan, penyediaan, dan penetapan infrastruktur yang dibutuhkan (Hendrita, 2017: 73). Potensi unik suatu daerah dalam bidang pariwisata harus dioptimalkan melalui pengembangan yang terencana (Khotimah & Wilopo, 2017: 57). Selain itu, potensi besar untuk pengembangan

pariwisata di Indonesia memberikan peluang yang menjanjikan (Sirait & Pinem, 2019: 30).

Provinsi Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman potensi pariwisata yang sangat tinggi yang ditandai dengan adanya berbagai destinasi wisata unggulan yang tersebar di berbagai daerah seperti Candi Borobudur di Kota Magelang, Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara, dan Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara. Potensi tersebut menarik minat wisatawan nusantara hingga wisatawan asing karena keindahan alam dan budaya lokalnya. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan *Indonesia Attractiveness Award* (IAA) sebagai provinsi besar terbaik dalam sektor pariwisata yang diselenggarakan oleh *Frontier Group* yang bekerja sama dengan *Tempo Media Group* atas penilaian bahwa Jawa Tengah memiliki tingkat daya tarik pariwisata yang sangat menonjol.

Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Asing	Total
2020	22.629.085	78.290	22.707.375
2021	21.332.409	1.793	21.334.202
2022	46.465.437	144.691	46.610.128
2023	56.485.087	464.719	56.949.806

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2023 (Diolah Peneliti)

Sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan yang berada di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa memiliki potensi wisata yang sangat menarik. Meskipun terkenal sebagai Kota Batik dengan pusat perbelanjaan

batiknya, Kota Pekalongan memiliki berbagai wisata alam dan wisata buatan yang menarik untuk dikunjungi (Nuraryo, 2018: 4). Wisata buatan di Kota Pekalongan mencakup Museum Batik dan Wisata Bahari Pekalongan. Sedangkan wisata alam di Kota Pekalongan mencakup Pantai Pasir Kencana, Pantai Slamaran Indah, dan Pekalongan Mangrove Park.

Tabel 1.2 Data Kunjungan Wisatawan Kota Pekalongan

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Asing	Total
2020	24.934	79	25.013
2021	45.922	-	45.922
2022	285.439	53	285.492
2023	163.798	236	164.034

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2020-2023. (Diolah Peneliti)

Kota Pekalongan terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki luas wilayah sekitar 4.525 hektar atau 45,25 km² dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 6,15 km. Kota Pekalongan memiliki potensi sektor pariwisata di kawasan pesisir. Menurut Bengen (dalam Prayogi & Sari, 2019: 21), dilihat dari perspektif ekologi, kawasan pesisir memiliki peran yang sangat krusial sebagai penyedia sumber daya alam, penunjang kehidupan, dan pelindung lingkungan. Sektor pariwisata di daerah pesisir Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana, Pantai Slamaran Indah, dan Pekalongan Mangrove Park. Namun, selain kawasan pesisir dapat dijadikan sebagai sektor pariwisata, terdapat ancaman utama yang dihadapi kawasan pesisir Kota Pekalongan yaitu abrasi yang terus mengikis wilayah pantai. Dalam 10 tahun

terakhir, kondisi abrasi pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah semakin memburuk dengan air laut yang telah masuk ke pemukiman masyarakat. Kondisi tersebut tentunya merugikan masyarakat Kota Pekalongan dan perlunya penanganan dari pemerintah. Untuk menanggulangi abrasi yang semakin mengkhawatirkan di pesisir Kota Pekalongan, pelestarian ekosistem mangrove menjadi solusi penting.

Mangrove merupakan komponen vital dalam ekosistem pesisir pantai yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomis. Secara ekologis, mangrove berperan dalam menjaga garis pantai dari gelombang laut, mencegah abrasi, menjaga stabilitas iklim mikro, menghasilkan oksigen, dan menjadi habitat bagi beragam fauna pesisir. Secara ekonomis, mangrove menjadi sumber bahan makanan dan bahan baku kerajinan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurut Rangkuti (dalam Lestari, Amirullah, & Ahmadin, 2019: 92), ekosistem mangrove memiliki peluang yang signifikan untuk dikembangkan menjadi kawasan berbasis ekowisata karena karakteristiknya yang khas serta sistem pengelolaannya yang menekankan pada pelestarian kondisi alami hutan dan keberlangsungan organisme yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan mengembangkan ekowisata mangrove sebagai upaya mendongkrak kepariwisataan berbasis ekowisata dan edukasi serta penyelamatan kondisi pantai dari ancaman abrasi.

Ekowisata merupakan pendekatan pariwisata yang menekankan pada aktivitas wisata dengan fokus utama pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang. Ekowisata berperan sebagai sarana edukatif yang memungkinkan

wisatawan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang lingkungan (Angela, 2023: 985-986). Konsep ini menekankan pentingnya upaya pelestarian lingkungan dan budaya, keterlibatan aktif masyarakat, pemerataan manfaat ekonomi, dan penguatan peran kelompok rentan sebagai respons terhadap kritik terhadap pariwisata massal (Kaharuddin, dkk, 2020: 43). Menurut Asy'ari R (2021: 10), ekowisata tidak hanya menggabungkan wisata dengan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan budaya lokal, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dan merupakan kegiatan wisata yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekologis. Hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tantangan yang kompleks akibat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, terutama di area pesisir yang rawan terhadap degradasi ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan tahun 2009 - 2029 Pasal 40, kawasan ekosistem mangrove dengan luas sekitar 88 hektar ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sepanjang pesisir Kota Pekalongan guna menjaga keseimbangan ekosistem serta melindungi wilayah pantai dari abrasi. Sebagai upaya pelestarian dan pengelolaan yang lebih terarah, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mendirikan Pekalongan Mangrove Park (PMP) yang diresmikan pada akhir tahun 2013 oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Pengelolaan di PMP mengusung prinsip ekowisata yang

mengedepankan pelestarian lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pekalongan Mangrove Park (PMP) merupakan bagian dari kluster wisata bahari yang memiliki dua keunggulan utama dalam wisata, yaitu edukasi dan alam. Pekalongan Mangrove Park (PMP) berlokasi di Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Wisata ini bertujuan mengembangkan potensi pariwisata yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. Menurut Tuwo (dalam Lestari, Amirullah, & Ahmadin, 2019: 92), hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata bahari, tetapi sekaligus berperan strategis melindungi wilayah pesisir dari potensi bencana alam seperti tsunami, mencegah abrasi, perangkap sedimen, mendaur ulang unsur hara, peningkatan produktivitas perikanan, mengurangi intrusi air laut, pemeliharaan kualitas lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta mendukung ekosistem pesisir lainnya. PMP dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti galeri ekosistem hutan mangrove, kolam sentuh (untuk edukasi tentang pembibitan dan penanaman mangrove), area pembibitan tanaman mangrove, serta budidaya rumput laut. Ada juga fasilitas gazebo, area parkir, kantin, mushola, toilet, gedung PRPM (Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove), dan jembatan sepanjang PMP.

Tabel 1.3 Data Kunjungan Wisatawan Pekalongan Mangrove Park

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Asing	Total
2020	1.805	10	1.815
2021	1.423	-	1.423

2022	3.187	-	3.187
2023	4.616	-	4.616

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2020-2023. (Diolah Peneliti)

Dari data diatas, menunjukkan bahwa Pekalongan Mangrove Park menjadi salah satu wisata di Kota Pekalongan yang menarik banyak pengunjung karena merupakan ekowisata dan juga edukasi yang dapat memberikan pengetahuan bagi para pengunjung. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pekalongan Mangrove Park (PMP) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan sebesar Rp 47.658.000,00 dalam kurun waktu 2020 - 2023.

Tabel 1.4 Data Kontribusi Pekalongan Mangrove Park terhadap PAD

Tahun	Kontribusi PAD
2020	Rp 6.441.750,00
2021	Rp 5.504.750,00
2022	Rp 14.885.500,00
2023	Rp 20.826.000,00
Total	Rp 47.658.000,00

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2020-2023. (Diolah Peneliti)

Pekalongan Mangrove Park pada tahun 2013 - 2018 dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pokmas Muara Rezeki. Pada tahun 2018, kewenangan pengelolaan PMP dibagi ke tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan,

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai OPD yang memiliki peran yang paling menonjol dengan tupoksi untuk mengelola wisata dan mengelola retribusi PMP. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harga tiket masuk ke area PMP dibagi menjadi 3, yaitu Rp 4.000,00 pada hari biasa, Rp 5.000,00 pada hari libur, dan Rp 10.000,00 pada hari tertentu. Pengunjung yang membawa kendaraan roda dua dikenakan biaya parkir sebesar Rp 2.000,00, kendaraan roda empat dikenakan biaya parkir sebesar Rp 5.000,00, bus, truk, dan kereta wisata dikenakan biaya parkir sebesar Rp 20.000,00, dan becak dikenakan biaya parkir sebesar Rp 1.000,00.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola PMP memiliki perannya masing - masing. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mengelola aspek pariwisata, termasuk promosi, pengembangan wisata, infrastruktur, dan retribusi. Dinas Kelautan dan Perikanan mengelola budidaya perikanan, rumput laut, dan aset gedung Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab pada pengelolaan ekosistem mangrove, termasuk pemeliharaan, pembibitan, penanaman, dan pelestarian mangrove. Namun, kondisi abrasi yang semakin parah menyebabkan banyaknya mangrove yang rusak sehingga saat ini beralih fungsi menjadi tempat pemancingan masyarakat. Upaya pembangunan *breakwater* sebagai pemecah ombak oleh Kemitraan Indonesia sebagai LSM belum terlaksana, sehingga

menyebabkan DLH menjadi kurang aktif dalam kegiatan penanaman mangrove dan budidaya rumput laut oleh DKP juga terhenti karena kondisi yang tidak memungkinkan. Sejauh ini, Diparbudpora sebagai pengelola utama yang paling berupaya untuk memelihara aset yang ada dan merencanakan berbagai perbaikan infrastruktur. Melihat situasi tersebut, diperlukan kolaborasi maksimal antara aktor yang terlibat guna melestarikan dan mengelola pengembangan PMP.

Dalam konteks ini, konsep *collaborative governance* menjadi sangat relevan untuk diterapkan guna mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan ekowisata. *Collaborative governance* merupakan suatu pendekatan kolaborasi dalam tata kelola yang berbasis pada tujuan untuk memecahkan permasalahan bersama dengan berbagai pihak terkait yang dimana tidak terbatas hanya pemerintah saja, namun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan diluar pemerintah (Berliandaldo M, dkk, 2021: 224). Menurut Ansell dan Gash (2007: 56), setiap pihak memiliki hak dan kewenangan yang setara tanpa hierarki, sehingga proses pengambilan keputusan secara partisipatif dan adil. Konsep *collaborative governance* sangat tepat diterapkan dalam pengelolaan ekowisata karena mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, memperkuat nilai edukatif, dan mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan.

Pekalongan Mangrove Park (PMP) memiliki potensi besar sebagai destinasi ekowisata, namun masih banyak menghadapi berbagai tantangan terutama dalam pengelolaannya dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana. Fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang pengembangan PMP belum dikembangkan

secara optimal. Sebagian besar pengunjung lebih tertarik untuk menikmati fasilitas rekreasi daripada edukasi sehingga tujuan utama PMP sebagai pusat edukasi mangrove belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan observasi awal peneliti, akses jalan menuju PMP sudah baik dengan kondisi jalan beraspal, namun banyak fasilitas pendukung yang kurang memadai sehingga diperlukan perhatian dan pengembangan lanjut terhadap upaya pelestarian untuk meningkatkan pengalaman wisata edukasi.

Gambar 1.1 Pembatas Jembatan Kayu Rusak dan Gazebo Kotor Berlumut



Sumber: Dokumentasi peneliti, 2024.

Kondisi fasilitas di PMP saat ini menunjukkan perlunya perbaikan, khususnya pada pembatas jembatan dan gazebo yang rusak dan tidak terawat. Pembatas jembatan yang seharusnya menjadi pengaman bagi pengunjung saat ini telah rusak, sementara gazebo yang awalnya berfungsi sebagai tempat bersantai sudah tidak layak digunakan. Kurangnya perawatan terhadap fasilitas pendukung ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan berpotensi menurunkan daya tarik serta jumlah kunjungan.

Gambar 1.2 Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Gedung Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) di Pekalongan Mangrove Park yang seharusnya menjadi pusat edukasi para wisatawan kini terbengkalai dan tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Gedung ini dirancang untuk memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai berbagai jenis mangrove yang ditanam di area tersebut. Namun, kondisi gedung PRPM kini sangat memprihatinkan dengan kondisi ruangan yang kotor, berantakan, dan beberapa peralatan yang ada di dalamnya sudah rusak sehingga menghambat pencapaian tujuan utama PMP sebagai ekowisata berbasis edukasi. Pengunjung tidak mendapatkan pengalaman belajar yang diharapkan dan upaya PMP sebagai pusat pembelajaran mangrove menjadi tidak optimal. Denah *masterplan* di gedung PRPM yang merupakan denah rencana pengembangan proyek PMP belum direalisasikan, bahkan tampak kotor dan tidak terawat. Hal tersebut mencerminkan kurangnya pengelolaan dan perhatian dari Pemerintah Kota Pekalongan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi nilai edukatif dan daya tarik PMP sebagai destinasi

ekowisata unggulan di Kota Pekalongan, tetapi juga mencerminkan lemahnya kerja sama antar pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puteri Mashita, *et al* (2025) dengan judul “*Collaborative governance* dalam Pengelolaan Objek Wisata Paralayang di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi” menunjukkan pentingnya pelaksanaan *collaborative governance* untuk mengoptimalkan pengelolaan objek wisata Paralayang Wayung. Kolaborasi antar pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, pemerintah desa Wayu, masyarakat lokal, pengelola objek wisata, dan pengunjung belum berjalan optimal. Aspek dialog tatap muka rutin dan pemahaman bersama antar pihak sudah cukup baik, tetapi aspek kepercayaan dan komitmen masih lemah akibat kurangnya transparansi dan partisipasi aktif. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif yang inklusif, komunikasi terbuka, transparansi, dan komitmen jangka panjang antar pemangku kepentingan untuk menciptakan ekowisata yang berkelanjutan. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak dapat dipungkiri bahwa Pekalongan Mangrove Park (PMP) yang mulanya didirikan sebagai wisata pelestarian mangrove guna pencegahan abrasi di Kota Pekalongan sekaligus sebagai wisata edukasi dapat mengalami kemunduran karena kurang optimalnya pelaksanaan kolaborasi antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata dan pelestarian ekosistem mangrove dalam wisata tersebut.

Melihat banyaknya berbagai permasalahan - permasalahan terkait fasilitas, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pengembangan ekowisata Pekalongan Mangrove Park (PMP) patut dipertanyakan mengenai bagaimana pelaksanaan

collaborative governance dalam pengelolaan ekowisata. Kawasan wisata PMP yang seharusnya dijaga karena berfungsi sebagai pelindung dari bencana tsunami, pencegah abrasi pantai, perangkap sedimen, penompang ekosistem pesisir lainnya, serta berperan sebagai wisata edukasi justru mengalami kemunduran dalam pengelolaannya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi proses *collaborative governance* dan faktor - faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP).

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang di atas, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP)?
2. Apa saja faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP).
2. Menganalisis faktor - faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP).

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil tinjauan, jenis kegunaan penelitian dikategorikan menjadi dua bagian sebagai berikut, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai sumber studi literatur dan memperkaya pemahaman terkait pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park (PMP) terutama dalam praktik kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata berbasis lingkungan. Penelitian ini juga menambah pengetahuan mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan, khususnya ekosistem mangrove sebagai upaya untuk mencegah abrasi. Selain itu, penelitian ini memperluas temuan penelitian - penelitian sebelumnya serta dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan mengenai pengelolaan ekowisata yang lebih efektif dan berkelanjutan agar dapat menarik lebih banyak wisatawan dan mengembangkan program wisata edukasi berbasis lingkungan yang juga berperan sebagai pelindung pesisir dari ancaman abrasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas wisata lokal dan

menjadikan Pekalongan Mangrove Park sebagai destinasi wisata unggulan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat

Penelitian ini memberikan rekomendasi dalam perumusan berbagai program yang lebih terarah bagi masyarakat sekitar dalam mendorong keberlanjutan, langkah konservatif terhadap lingkungan yang mendorong meningkatnya wawasan dan sikap peduli masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan mangrove, serta memberdayakan masyarakat dalam berkontribusi dalam kegiatan pariwisata berbasis masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian mangrove sebagai ekowisata dan edukasi yang juga berperan sebagai pelindung pesisir dari ancaman abrasi.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas serta memperdalam wawasan bagi peneliti terkait proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP) dan faktor - faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP).

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh berbagai perbandingan konseptual dan empiris sebagai landasan dalam memperkuat argumentasi penelitian. Bagian penelitian terdahulu ini tidak hanya merangkum penelitian

sebelumnya, tetapi juga menganalisis persamaan, perbedaan, serta *research gap* yang belum dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian terdahulu berfungsi untuk memetakan perkembangan studi *collaboartive governance* sekaligus menegaskan posisi dan kontribusi penelitian ini.

1. Puteri Mashita, et al (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Puteri Mashita, *et al* pada tahun 2025 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Objek Wisata Paralayang di Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi” merupakan salah satu penelitian yang terbit pada JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, 31-38. Penelitian ini menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata Paralayang di Kabupaten Sigi yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan seperti minimnya infratraktur, promosi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, pemerintah desa Wayu, masyarakat lokal, pengelola objek wisata, dan pengunjung belum berjalan optimal karena lemahnya kepercayaan dan komitmen antar aktor meskipun dialog tatap muka dan pemahaman bersama telah terbangun. Temuan ini menegaskan bahwa aspek kepercayaan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kolaborasi.

2. Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, et al (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Bagus Rama Iswara Milandika, *et al* pada tahun 2024 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengembangan Berkelanjutan Desa Wisata Kamasan” merupakan salah satu penelitian yang terbit pada Jurnal *Socio-Political Communication and Policy Review*, Volume 1, Nomor 5, 23-34. Penelitian ini mengkaji bahwa Desa Klungkung, Bali memiliki potensi besar sebagai desa wisata berbasis budaya, namun pengembangannya menghadapi tantangan seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, perubahan sosial dan demografi, dan minimnya pemanfaatan media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini juga menganalisis delapan indikator *collaborative governance* dari Edward DeSeve. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pihak lain sudah cukup baik dengan adanya struktur jaringan yang setara, komitmen bersama, dan kepercayaan antar pihak. Namun, terdapat kendala dalam penyebaran informasi dan keterbatasan sumber daya.

3. Zulhadi, et al (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Zulhadi, *et al* pada tahun 2023 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung” merupakan salah satu penelitian yang terbit pada Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5, Nomor 1, 1244-1254. Penelitian ini menyoroti upaya kolaboratif dalam mengatasi kerusakan

Sungai Citarum, salah satu sugai terkotor di dunia. Kompleksitas masalah dari hulu hingga hilir, seperti deforestasi, pencemaran limbah, dan buruknya pengelolaan tata ruang mendorong perlunya pendekatan *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun telah menghasilkan perbaikan nyata seperti penghijauan kawasan hulu, peningkatan kualitas air, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Namun, keterlibatan sektor swasta masih minim sehingga hasil belum maksimal.

4. Imam Surya, et al (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Surya, et al pada tahun 2021 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun The Nglinggo)” merupakan salah satu penelitian yang terbit pada AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 6, Nomor 21, 190-199. Penelitian ini membahas pengelolaan wisata berkelanjutan di Kebun Teh Nglinggo, Kabupaten Kulon Progo dengan pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan wisata Kebun Teh Nglinggo sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pemerintah memberikan dukungan regulasi dan promosi, swasta menyediakan fasilitas,

dan mendorong UMKM, sedangkan masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan wisata. Pembagian peran yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata.

5. Nadia F Tongkotow, *et al* (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia F Tongkotow, *et al* pada tahun 2021 dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatoto” merupakan salah satu penelitian yang terbit pada Jurnal *Governance*, Volume 1, Nomor 1, 1-11. Penelitian ini membahas terkait pengelolaan wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatoto yang belum menerapkan prinsip *collaborative governance* secara optimal. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata mengelola objek wisata secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat lokal dan pihak swasta secara aktif, sehingga manfaat ekonomi bagi warga tidak maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan sebagai pelaku pendukung, bukan pengambil keputusan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan belum terjalin dengan semestinya yang menyebabkan pengelolaan wisata tidak berkelanjutan dan belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara signifikan.

Dari penelitian yang telah peneliti cantumkan di atas dari berbagai jurnal mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan wisata, penelitian mengungkapkan bahwa konsep ini sangat penting dalam menciptakan tata kelola wisata yang berkelanjutan. Namun demikian, penelitian - penelitian tersebut masih

dominan membahas kolaborasi dalam konteks desa wisata atau kawasan lingkungan. Belum terdapat penelitian yang secara spesifik menganalisis dinamika kolaborasi dalam pengelolaan ekowisata mangrove sebagai kawasan konservasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah secara mendalam terkait proses *collaborative governance* serta faktor - faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park. Penelitian ini menjadi menarik karena menawarkan perspektif baru pada aspek kolaboratif dan permasalahan yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan sektor pariwisata lokal.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Definisi Kolaborasi

Secara etimologis, konsep kolaborasi tersusun dari kata “*co*” dan “*labor*” yang menggambarkan aktivitas kolektif dengan mengintegrasikan berbagai upaya serta kapasitas guna mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Secara terminologis, kolaborasi memiliki makna yang luas, yaitu menggambarkan situasi ketika dua orang atau lebih atau bahkan institusi bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan serta masing - masing pihak memahami permasalahan satu sama lain dan berupaya saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama - sama. Konsep kolaborasi atau *collaborative* merujuk pada aktivitas bekerja secara bersama - sama yang melibatkan individu, kelompok, maupun organisasi untuk berpartisipasi dan berperan secara kolektif dalam berbagai aktivitas. Menurut O’Leary (dalam Pahlevi, dkk, 2023: 218), kolaborasi kerap

digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian pekerjaan yang melibatkan berbagai batasan, sektor, hubungan, atau organisasi dan dapat juga mencakup kerja sama antara negara - negara. Namun, menurut Gray (dalam Pahlevi, dkk, 2023: 219) kolaborasi merupakan proses dinamis yang terbentuk melalui perkembangan kelompok dan pencapaian hasil sehingga menciptakan sintesis dari berbagai pandangan yang beragam.

Sejumlah ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai serangkaian langkah yang berlangsung secara linier seiring berjalannya waktu. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah, diikuti oleh penetapan agenda, dan berakhir pada tahap pelaksanaan, di mana prinsip - prinsip kolaborasi bersama dapat terus dikembangkan. Proses ini dapat berlangsung melalui dialog langsung atau dengan bantuan teknologi yang bertujuan untuk mendorong prinsip bersama. Tahapan ini mencakup upaya memperkuat tujuan kolektif sekaligus membangun dan mengembangkan prinsip - prinsip dasar dalam kolaborasi yang seringkali muncul dari beragam perspektif para aktor yang terlibat. Dengan demikian, kesepakatan mengenai prinsip - prinsip bersama menjadi inti dari proses kolaborasi (Emerson, dkk, 2012: 10). Kolaborasi memungkinkan pengungkapan kepentingan, nilai, dan upaya membangun kepentingan bersama di antara para aktor. Analisis terhadap keterlibatan aktor dalam kolaborasi juga dapat mengungkapkan alasan dan kepentingan setiap aktor untuk berpartisipasi. Pembahasan mengenai kolaborasi multisektor menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan pariwisata karena tercapainya pariwisata berkelanjutan tidak dapat direalisasikan oleh satu aktor saja, tetapi memerlukan keterlibatan serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan

(Hermansyah, dkk, 2020: 140). Keterlibatan pihak non pemerintah dalam pengelolaan pariwisata dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor pariwisata melalui hubungan kolaboratif yang terjalin.

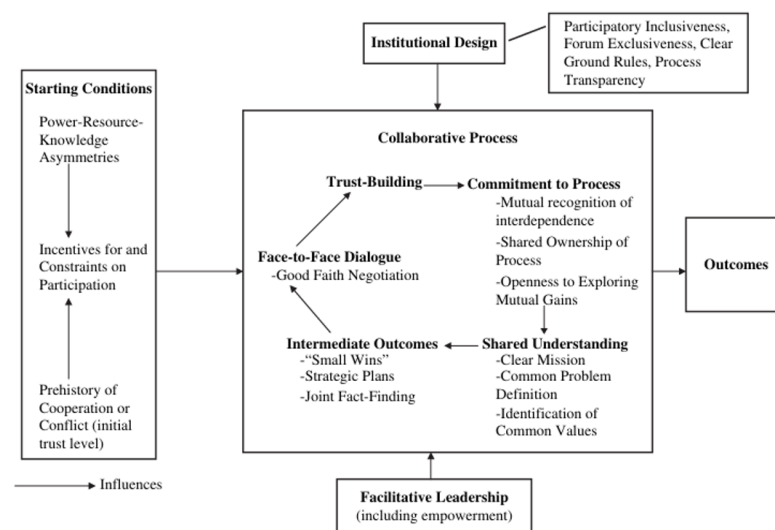
Pengelolaan sektor pariwisata tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, melainkan juga melibatkan peran dan kontribusi seluruh aktor dalam pariwisata yang memiliki peran krusial dalam memajukan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat tercapai jika kolaborasi antara seluruh aktor di sektor pariwisata terlaksana dengan baik atau dengan kata lain, melalui penerapan *collaborative governance* dalam bidang pariwisata.

1.6.2 Teori Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (dalam Hermansyah, dkk, 2020: 140), *collaborative governance* dipahami sebagai suatu skema pengaturan yang mencakup keterlibatan satu atau lebih institusi publik dalam menjalin kerja sama dengan aktor non pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama ini berfokus pada keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. *Collaborative governance* dianggap sesuai untuk menganalisis pengelolaan sektor pariwisata karena konsep ini mampu memetakan kolaborasi antara pihak - pihak yang terlibat dalam pengembangannya. Ansell dan Gash (2007: 543) mendefinisikan kolaborasi berdasarkan enam unsur utama. Pertama, forum kolaborasi harus digagas oleh lembaga publik. Kedua, forum tersebut perlu melibatkan aktor non - pemerintah. Ketiga, seluruh pihak yang terlibat harus berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan, bukan sekedar memberikan saran kepada pemerintah. Keempat, forum kolaborasi harus memiliki

struktur yang jelas dan menyelenggarakan pertemuan yang terstruktur. Kelima, setiap keputusan ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Terakhir, kolaborasi tersebut ditujukan bagi kebijakan atau manajemen publik (Ansell dan Gash, 2007: 544).

Gambar 1.3 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash, 2007.

Menurut Christopher Ansell dan Alison Gash (2007: 543-571) dalam *Journal of Public Administration Research and Theory* yang berjudul “*Collaborative Governance in Theory and Practice*” menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdapat lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Dialog tatap muka merupakan fondasi utama dalam proses kolaboratif. Ansell dan Gash (2007: 557-558) menegaskan bahwa komunikasi tatap muka antar pemangku kepentingan merupakan sarana penting dalam membangun pemahaman bersama dan menemukan peluang keuntungan bersama. Interaksi

ini tidak sekedar sebagai media negosiasi, tetapi juga menjadi wadah untuk memecah stereotip, membangun rasa saling pengertian, serta mengurangi prasangka dan ketegangan antar pihak. Melalui komunikasi langsung yang intens, para aktor dapat saling mengenal perspektif, kepentingan, dan keterbatasan masing - masing yang pada akhirnya menciptakan dasar bagi kepercayaan dan kerja sama yang produktif.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses membangun kepercayaan menjadi unsur krusial antar pemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2007: 558) menjelaskan bahwa kolaborasi tidak sekedar negosiasi, melainkan juga proses untuk menumbuhkan kepercayaan dan rasa saling menghormati. Kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan, membutuhkan waktu, konsistensi, dan interaksi yang berulang. Keberhasilan kolaborasi seringkali bergantung pada kemampuan para aktor untuk menunjukkan komitmen jangka panjang serta transparansi dalam komunikasi. Oleh karena itu, untuk mencegah munculnya egosentrisme antar pihak - pihak yang terlibat, perlu adanya alokasi waktu khusus untuk membangun kepercayaan secara bertahap sebelum melangkah ke tahap kesepakatan substansial.

3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen dalam proses kolaborasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ansell dan Gash (2007: 558-559) menjelaskan bahwa komitmen merupakan dorongan atau keinginan kuat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan kolaboratif. Setiap pihak yang berpartisipasi perlu memiliki komitmen yang

kokoh guna meminimalkan berbagai risiko yang mungkin muncul selama proses kolaborasi berlangsung. Selain itu, komitmen juga menjadi bentuk tanggung jawab setiap pemangku kepentingan untuk memandang hubungan kerja sama yang terjalin dipandang sebagai upaya yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan.

4. Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama terbentuk ketika para pemangku kepentingan memiliki persepsi, tujuan, dan nilai yang relatif sejalan terhadap isu yang dihadapi. Dalam konteks ini, kolaborasi mendorong pembelajaran bersama, di mana setiap pihak yang berkontribusi dalam merumuskan definisi masalah, visi, dan strategi penyelesaian yang disepakati bersama. Ansell dan Gash (2007: 559) menekankan pentingnya penyamaan persepsi terhadap masalah inti dan tujuan bersama, karena hal ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan.

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara dipahami sebagai capaian awal yang diperoleh selama proses kolaborasi berlangsung, seperti terbentuknya kesepakatan awal, keberhasilan dalam *joint fact-finding*, atau tercapainya *small wins*. Ansell dan Gash (2007: 560-561) menegaskan bahwa ketika kolaborasi menghasilkan kemajuan, mereka akan lebih termotivasi untuk melanjutkan kerja sama. Dengan demikian, *small wins* berfungsi sebagai katalis yang memperdalam kepercayaan, memperkuat rasa kepemilikan, dan memantapkan dasar bagi pencapaian hasil akhir yang lebih besar.

Pada dasarnya, kolaborasi dapat dipahami sebagai mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut, diperlukan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara demi tercapainya tujuan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan tahap dalam penelitian di mana peneliti menguraikan secara jelas makna konsep yang digunakan dalam penelitian agar memiliki batasan yang terarah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Christopher Ansell dan Alison Gash. Menurut Ansell dan Gash (dalam Hermansyah, dkk, 2020: 140), *collaborative governance* dipahami sebagai suatu skema pengaturan yang mencakup keterlibatan satu atau lebih institusi publik dalam menjalin kerja sama dengan aktor non pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini berfokus pada fenomena *collaborative governance* dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP). Untuk menganalisis lebih mendalam terkait kolaborasi tersebut, peneliti menggunakan lima tahapan proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Christopher Ansell dan Alison Gash, sebagai berikut:

1. Dialog Tatap Muka

- a. Intensitas dan frekuensi pertemuan antar pemangku kepentingan.

2. Membangun Kepercayaan
 - a. Transparansi dalam setiap pelaksanaan kolaborasi untuk membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan.
 - b. Adanya rasa saling menghargai dan tanggung jawab bersama terhadap kolaborasi.
3. Komitmen terhadap Proses
 - a. Partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam kolaborasi.
 - b. Keteguhan pemangku kepentingan dalam kolaborasi meskipun menghadapi hambatan.
4. Pemahaman Bersama
 - a. Kesepakatan bersama terhadap tujuan dan strategi pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP).
5. Hasil Sementara
 - a. Adanya capaian sementara yang dihasilkan dari kolaborasi.
 - b. Adanya pembentukan rencana strategis bersama yang disusun oleh semua pemangku kepentingan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Walidin, *et al* (2015: 77), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menelaah fenomena sosial maupun perilaku manusia secara mendalam dan menyeluruh dengan penyajian data dalam bentuk uraian naratif.

Pendekatan ini menekankan pada penggalian informasi secara rinci dari informan serta dilakukan dalam situasi dan kondisi yang alami sesuai dengan konteks penelitian. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di objek wisata Pekalongan Mangrove Park yang berada di Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang berperan sebagai penyedia data dalam penelitian melalui pemberian informasi sesuai dengan fokus kajian. Dalam penelitian ini, subjek yang ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan sumber data dalam melakukan penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Kemitraan Indonesia, dan masyarakat.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa jenis, meliputi data dari studi pustaka yang dihimpun dari berbagai jurnal maupun buku yang relevan dengan topik penelitian, data primer yang diperoleh melalui

wawancara dengan subjek penelitian, serta dokumentasi yang akan disertakan pada bagian lampiran.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Siyoto, *et al* (2015: 67-68), sumber data dalam penelitian dibedakan dalam dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama, sementara data sekunder berasal dari pengumpulan bahan pendukung seperti literatur atau dokumen terkait. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, diantaranya:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama. Pada penelitian ini, data tersebut diperoleh melalui wawancara antara peneliti dengan subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber studi literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh berasal dari hasil - hasil penelitian terdahulu, jurnal, maupun buku yang memiliki topik relevan dengan topik penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata dan artikel - artikel yang membahas mengenai topik tersebut.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data menjadi bagian penting dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Pelaksanaannya

dilakukan melalui penetapan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan fokus kajian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah *indepth interview*, dilakukan melalui tanya jawab dengan responden secara mendalam yang bertujuan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin dan terperinci. Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan subjek yang ditentukan berdasarkan kriteria khusus yang dinilai relevan oleh peneliti. Narasumber yang dipilih mencakup Bapak Retno Purnomo selaku Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Bapak Mochtar Sanusi selaku Kepala Bidang Budidaya Perikanan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan, Ibu Sukmandari Hersandini selaku Penata Layanan Operasional dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bapak Arif Mahmudi selaku *Team Leader* Adaptation Fund Kota Pekalongan dari Kemitraan Indonesia, dan Bapak Wahyono selaku masyarakat sekaligus Pengurus Pokmas Muara Rezeki Tahun 2013-2018 yang harapannya dapat memberikan informasi dan jawaban yang bersifat terbuka. Dalam proses wawancara dengan

pemangku kepentingan, peneliti menggunakan panduan pertanyaan yang juga memungkinkan muncul pertanyaan tambahan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung subjek maupun objek penelitian di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, kegiatan observasi dilaksanakan melalui keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan untuk mengamati proses pengelolaan ekowisata di Pekalongan Mangrove Park yang berada di Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam pengumpulan data adalah merupakan cara memperoleh data dengan menelusuri berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan objek atau variabel penelitian berupa bahan - bahan penunjang penelitian, seperti dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah yang mengatur alokasi kawasan hutan mangrove untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan beberapa gambar yang diambil selama proses wawancara dengan narasumber.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan terhadap data yang dihimpun melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk memperdalam pemahaman serta menginterpretasikan informasi dan temuan yang diperoleh peneliti, diantaranya:

1. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti secara objektif menelusuri dan menggali berbagai hal yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan subjek penelitian yang mencakup Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Kemitraan Indonesia, dan masyarakat. Peneliti juga melakukan observasi langsung serta dokumentasi sesuai dengan hal - hal yang diperlukan dalam penelitian.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses peringkasan, pemilahan, dan pemusatan data pada informasi yang dinilai penting dan relevan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengolah hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian sehingga memperoleh gambaran yang lebih terarah dan fokus.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan jawaban atas pertanyaan - pertanyaan yang menjadi fokus rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kesimpulan dirumuskan untuk mendapatkan hasil yang objektif terkait *collaborative goveranance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park (PMP) dan faktor -

faktor yang mendukung atau menghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan ekowisata Pekalongan Mangrove Park.

1.8.8 Kualitas Data (Validitas Data)

Validasi data dilakukan untuk menjamin keabsahan data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai upaya untuk memvalidasi keakuratan data yang telah diperoleh. Metode triangulasi tidak hanya bertujuan memastikan validitas data, tetapi juga untuk memperkaya temuan serta menggali informasi yang lebih mendalam melalui berbagai sumber informan. Menurut Neuman (2014: 166), triangulasi merupakan teknik yang menggunakan berbagai sumber atau data untuk memeriksa atau membandingkan data yang diperoleh, bukan untuk mencari kebenaran melainkan untuk membantu peneliti memahami data dan fakta secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lainnya. Metode ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan memiliki keabsahan dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif.